

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

Volume 6 / Nomor 2 / Tahun 2018 / Hal. 126 - 197

Proses Input Dalam Efektivitas Pelayanan Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp) *Online* Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Provinsi Jawa Barat

Andi Pratama

Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia

Hasan Supriadi

Keputusan Politik Sultan Dalam Kerangka Negara Demokrasi

Muhammad Quranul Kariem

Aspek Tangibles Dalam Pelayanan Aksesibilitas Trotoar Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Di Kota Bandung

Nia Karniawati

Aspek Pembinaan Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Karang Taruna Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi

Samugyo Ibnu Redjo, Agustinus Widanarto, Muradi dan Rita Myrna

Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia

Suryanto

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNIKOM**

**p-ISSN : 2337-5299
e-ISSN : 2579-3047**

JURNAL AGREGASI

Merupakan Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.

DEWAN REDAKSI

Pembina :

Dekan FISIP Unikom

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA.

Penanggung jawab :

Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unikom

Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.

Ketua :

Dr. Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.

Mitra Bestari :

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.,MA

Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., MA.

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.IP., M.Si.

Tim Editing :

Dr. Poni Sukaesih K, S.IP.,M.Si.

Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.

Tatik Fidowaty, S.IP.,M.Si.

Rino Adibowo, S.IP.,M.I.POL

Sekretariat :

Airinawati, A.Md.

Alamat Redaksi :

Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom

Jl. Dipati Ukur 112-114 Bandung 40132

Telp. 022.2533676 Fax. 022.2506577

OJS : <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Web : <http://jurnalagregasi.ip.unikom.ac.id>

Email : jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

KATA PENGANTAR

Ass. Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Kita Panjatkan kehadiran *Illahi Robbi*, atas berkah dan rahmatNya, Jurnal Agregasi Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018 dapat kami terbitkan. Jurnal ini merupakan karya ilmiah dari Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dan Kontributor lain di luar lingkungan Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom yang terdiri dari para dosen, pakar maupun praktisi di bidang Pemerintahan.

Dalam Jurnal Agregasi Volume 6 Nomor 1 ini terdapat enam tulisan. Tulisan tersebut merupakan karya ilmiah dari Andi Pratama dari Pascasarjana Universitas Langlangbuana Bandung, Hasan Supriadi dan Nia Karniawati dari Universitas Komputer Indonesia, Muhammad Quranul Kariem dari Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Samugyo Ibnu Redjo, dkk dan Suryanto dari Universitas Padjadjaran Bandung. Kepada yang telah berkontribusi memberikan tulisan kami haturkan banyak terima kasih.

Besar harapan kami, karya ilmiah yang terdapat dalam jurnal ini dapat memberikan banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih.

Wss. Wr. Wb.

Bandung, November 2018

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

e-ISSN: 2579-3047/p-ISSN: 2337-5299/ Vol.6/No.2/Th.2018/Hal. 126-197

DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Proses Input Dalam Efektivitas Pelayanan Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp) <i>Online</i> Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat Oleh: Andi Pratama	126-138
Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia Oleh: Hasan Supriadi	139-148
Keputusan Politik Sultan Dalam Kerangka Negara Demokrasi Oleh: Muhammad Quranul Kariem	149-157
Aspek Tangibles Dalam Pelayanan Aksesibilitas Trotoar Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Di Kota Bandung Oleh: Nia Karniawati	158-171
Aspek Pembinaan Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Karang Taruna Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Oleh: Samugyo Ibnu Redjo, Agustinus Widanarto, Muradi dan Rita Myrna	172-178
Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia Oleh: Suryanto	179-197

ASPEK TANGIBLES DALAM PELAYANAN AKSESIBILITAS TROTOAR JALAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA DI KOTA BANDUNG

Nia Karniawati¹
nia.karniawati@email.unikom.ac.id

ABSTRAK

Penyediaan aksesibilitas trotoar jalan bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu tugas Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan pada trotoar di Jalan Ir.H.Djuanda, yang dikenal juga dengan Jalan Dago. Jalan Ir.H.Djuanda merupakan salah satu icon Kota Bandung. Fokus penelitian ini pada aspek *tangible* dalam pelayanan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan akses trotoar jalan bagi penyandang disabilitas tuna netra.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan pendekatan *case study* dengan analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bandung melakukan revitalisasi terhadap trotoar di Kota Bandung, termasuk trotoar di Jalan Ir. H.Djuanda pada tahun 2016. Namun revitalisasi ini tidak dilakukan pada seluruh trotoar Jalan Ir. H.Djuanda. revitalisasi difokuskan pada trotoar Jalan Ir.H.Djuanda mulai dari perempatan Jalan Ir.H.Djuanda-Jalan Dipati Ukur sampai dengan perempatan Jalan Ir.H.Djuanda-Jalan REE.Martadinata. Sedangkan trotoar Jalan Ir.H.Djuanda dari Terminal Dago sampai Pasar Simpang Dago tidak dilakukan revitalisasi, sehingga kondisinya memprihatinkan. Sedangkan untuk trotoar yang telah mengalami revitalisasi kondisinya sangat baik. Fasilitas yang tersedia sangat lengkap. Demikian pula dengan fasilitas aksesibilitas trotoar bagi penyandang disabilitas tunanetra.

Kata kunci : Pelayanan aspek *tangibles*, aksesibilitas trotoar jalan, penyandang disabilitas tunanetra.

PENDAHULUAN

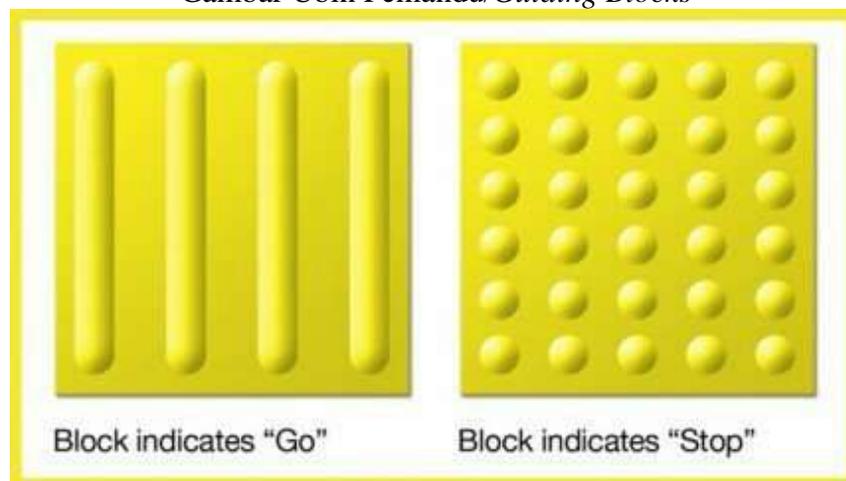
Penyediaan aksesibilitas trotoar jalan bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu tugas Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat, bahwa Pemerintah Kota Bandung mempunyai kewajiban untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas trotoar jalan bagi penyandang disabilitas ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Dalam peraturan tersebut

¹ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom

dijelaskan bahwa Dijelaskan bahwa pada trotoar harus terdapat ubin dengan tekstur pemandu bagi penyandang disabilitas tunanetra yang dikenal juga dengan istilah *guiding blocks*.

Dijelaskan bahwa pada trotoar harus terdapat ubin dengan tekstur pemandu bagi penyandang disabilitas tunanetra yang dikenal juga dengan istilah *guiding blocks*. Tekstur ubin yang menandakan sebagai pengarah bertekstur garis-garis. Ini menunjukkan arah perjalanan. Kemudian tekstur ubin yang menandakan sebagai peringatan bertekstur bulat-bulat. Ini memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya. Tekstur ubin tersenut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar Ubin Pemandu/*Guiding Blocks*



Sumber :

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi-hZ7QjuzeAhUHM48KHbYWDmIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftrotoarian%2Fstatus%2F382901681635082240&psig=AOvVaw3Ao9-2pATHEMA_rT8W7pUQ&ust=1543117416955854. 2018

Penelitian ini akan menitikberatkan pada aspek tangible dalam pelayanan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan akses trotoar jalan bagi penyandang disabilitas tuna netra. Penyandang disabilitas tunanetra merupakan mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak cukup baik untuk membaca tulisan biasa meskipun sudah dibantu dengan kaca mata. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi para penyandang disabilitas tunanetra saat menggunakan akses trotar jalan dapat disebabkan oleh beberapa hal yang tidak sesuai dengan

kondisi dan kebutuhan. Diantaranya desain arsitektural yang ada, tidak adanya petunjuk arah atau ciri-ciri yang dapat didengar atau dilihat dengan penglihatan terbatas.

Penelitian ini dilakukan pada trotoar di Jalan Ir.H.Djuanda, yang dikenal juga dengan Jalan Dago. Jalan Ir.H.Djuanda merupakan salah satu icon Kota Bandung. Fokus penelitian ini pada aspek *tangible* dalam pelayanan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan akses trotoar jalan bagi penyandang disabilitas tuna netra. Tujuan dari penelitian pelayanan aksesibilitas trotoar jalan bagi penyandang disabilitas tuna netra di Kota Bandung pada aspek tangibles ini ialah untuk menemukan ketersediaan bukti fisik dalam pelayanan aksesibilitas trotoar jalan bagi penyandang disabilitas tuna netra di Kota Bandung.

KAJIAN PUSTAKA

Aksesibilitas Trotoar Jalan Penyandang Disabilitas Tunanetra.

Undang-undang Nomor Tahun 1997 Tentang Penyandang disabilitas, menjelaskan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (pasal 1 ayat 4). Kemudian dijelaskan pula bahwa penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat (pasal 10 ayat 2).

Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 26 tahun 2009 dijelaskan pula bahwa pengadaan sarana dan prasarana umum yang menyediakan aksesibilitas bagi ini penyandang disabilitas merupakan kewajiban dari pemerintah daerah. Penyediaan aksesibilitas ini untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar sepenuhnya hidup bermasyarakat. Penyediaan aksesibilitas ini dapat berbentuk fasilitas fisik dan non fisik.

Aksesibilitas yang berbentuk non fisik ini meliputi pelayanan informasi dan pelayanan khusus. Aksesibilitas yang berbentuk fisik merupakan seluruh sarana dan prasarana umum yang meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, aksesibilitas pada jalan umum, aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum, aksesibilitas pada angkutan umum dan aksesibilitas pada sarana keagamaan.

Selanjutnya pada pasal 32 Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 26 tahun 2009 dijelaskan bahwa aksesibilitas pada jalan umum dilaksanakan dengan menyediakan akses kendaraan dari jalan umum, akses ke tempat penyebrangan bis/kendaraan, jembatan penyebrangan, jalur penyebrangan bagi pejalan kaki, tempat parkir dan naik turun penumpang, tempat pemberhentian kendaraan umum, tanda-tanda/rambu-rambu/dan /marka jalan, trotoar bagi pejalan kaki atau pemakai kursi roda, dan terowongan penyebrangan.

Trotoar merupakan salah satu aksesibilitas ruang public yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan pasal 32 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat. Setiap trotoar wajib memiliki tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas tunanetra. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, menjelaskan tentang tanda-tanda aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tunanetra di trotoar.

Dijelaskan bahwa pada trotoar harus terdapat ubin dengan tekstur pemandu bagi penyandang disabilitas tunanetra yang dikenal juga dengan istilah *guiding blocks*. Tekstur ubin yang menandakan sebagai pengarah bertekstur garis-garis. Ini menunjukkan arah perjalanan. Kemudian tekstur ubin yang menandakan sebagai peringatan bertekstur bulat-bulat. Ini memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya.

Disabilitas.

Pengertian disabilitas Menurut Undang-Undang No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. disabilitas atau Difabel adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari (a) penyandang cacat fisik, (b) penyandang cacat mental, dan (c) penyandang cacat fisik dan mental.

Berdasarkan undang-undang tersebut, disabilitas cacat fisik merupakan ketidakmampuan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh. Fungsi tubuh tersebut antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan bicara.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, tunanetra artinya tidak dapat melihat. Jadi dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas tunanetra merupakan penyandang cacat fisik dikarenakan fungsi tubuh melihatnya tidak berfungsi. Dijelaskan pula bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh aksesibilitas yang sama dengan masyarakat umumnya. Aksesibilitas tersebut untuk meningkatkan kemandirian dari penyandang disabilitas.

Pelayanan

Ndraha (1997) memberikan batasan pelayanan yang menjadi fungsi utama dari pemerintah, yaitu: Pelayanan (*service*) yang meliputi jasa dan pelayanan. Jasa adalah komoditi, sedangkan layanan pemerintah terkait dengan suatu hak dan lepas dari persoalan apakah pemegang hak itu dapat dibebani suatu kewajiban atau tidak. Lembaga yang berkewajiban memenuhi hak-hak tersebut adalah pemerintah, kegiatan pemerintah untuk memenuhi hak bawaan dan hak pemberian inilah yang disebut pelayanan kepada masyarakat.

Zeithamil, Parasuraman dan Berry (1990:26), mengemukakan terdapat sepuluh aspek yang saling melengkapi dan membentuk kualitas pelayanan. Dari sepuluh aspek tersebut terdapat lima aspek yang dianggap mewakili sepuluh aspek tadi, yang dikenal dengan SERVQUAL/*Service Quality*. Aspek pelayanan menurutnya terdiri dari :

- (1) *Tangibles : appreance of physical facilities, equipment, personal, and communication materials.*
 - (2) *Reliability : ability to ferform the promised service dependably and accurately.*
 - (3) *Responsiveness : willingness to help costumers and provide promt service.*
 - (4) *Assurance : knowledge and courtesy of employees and their ability to convey trust and confidence.*
 - (5) *Emphathy : caring, individualized attention the firm provides its costumers.*
- (Zeithamil, Parasuraman dan Berry, 1990:26)

Dimensi pelayanan tersebut sesuai dengan penelitian ini karena penjabaran kelima dimensi pelayanan tersebut mampu mempresentasikan berbagai aspek dalam pelayanan aksesibilitas trotoar jalan bagi penyandang disabilitas tuna netra di Kota Bandung pada aspek tangibles Selain itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh

Ratminto (2010) bahwa dimensi yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithamil dan Berry tersebut tidak hanya berorientasi pada proses berjalannya pelayanan namun juga pada hasil yang dicapai dari pelayanan tersebut.

Tangibles (wujud fisik), merupakan seluruh karakteristik penampilan yang berhubungan dengan struktur fisik dalam pelayanan. Ini berkaitan dengan (1) Kelengkapan fasilitas, (2) Keberfungsian fasilitas dan kenyamanan sarana/prasarana. **Reliability (keajegan)**, merupakan kemampuan dan antisipasi dari aparatur untuk menyelenggarakan pelayanan yang akurat sesuai dengan yang dijanjikan. Ini berkaitan dengan (1) janji penyelesaian yang tepat waktu, (2) hasil pelayanan yang tepat, (3) Tarif/biaya sesuai aturan. **Responsiveness (Ketanggapan)**, merupakan kesediaan aparatur dalam melayani dengan memberikan pelayanan sesuai permintaan pengguna. Ini berkaitan dengan (1) Kesediaan membantu pengguna yang cepat dan tepat, (2) berorientasi pada kebutuhan pengguna, (3) Memberikan solusi yang terbaik pada pengguna. **Assurance (jaminan kepastian)**, merupakan kemampuan aparatur dalam pelayanan dengan memberikan jaminan dan memegang kepercayaan pengguna. Ini berkaitan dengan aparatur yang (1) Melayani dengan sopan dan ramah, (2) Memberikan jaminan terhadap hasil layanan, (3) Menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap pengguna. **Emphathy (memahami kebutuhan pengguna)**, merupakan perilaku dari aparatur dalam memberikan pelayanan dengan berperilaku memahami dan mengerti kebutuhan pengguna. Ini berkaitan dengan (1) Kemudahan mengadakan kontak/hubungan, (2) Menyampaikan dengan Bahasa yang jelas, mudah dipahami dan menyesuaikan dengan pengguna (3) Memahami harapan/keluhan pengguna.

Dari dimensi tersebut, yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah aspek *Tangibles* (wujud fisik). Dalam aspek tangibles ini berkaitan dengan fasilitas yang tersedia dalam pelayanan aksesibilitas trotoar jalan bagi penyandang disabilitas tuna netra di Kota Bandung Dalam aspek ini terbagi atas : (1) Kelengkapan fasilitas online, (2) Keberfungsian fasilitas online yang berkaitan dengan kenyamanan pengguna.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan pendekatan *case study* dengan analisa deskriptif. Sumber data yang diperoleh terbagi atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Dan Teknik analisa data menggunakan tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Lokasi penelitian di Kota Bandung, khususnya pada trotoar di Jalan Ir.H.Djuanda, yang dikenal juga dengan Jalan Dago. Jalan Ir.H.Djuanda merupakan salah satu icon Kota Bandung. Jalan sepanjang 2,5 km tersebut berada di wilayah utara Kota Bandung. Analisis penelitian ini membagi Jalan Ir. H. Djuanda ke dalam dua bagian. Bagian pertama, dari arah utara ke selatan, dimulai dari terminal Dago sampai ke Pasar Simpang Dago. Bagian kedua, dimulai dari simpang Dago sampai ke Jalan REE.Martadinata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Penyandang disabilitas di Kota Bandung menurut data dari Dinas Sosial Kota Bandung pada tahun 2015 sebanyak 2.305 orang. Data tersebut termasuk penyandang disabilitas tunanetra. Penyandang disabilitas tunanetra ini merupakan penyandang disabilitas yang banyak melakukan kegiatan aktivitas diluar ruangan.

Trotoar merupakan salah satu aksesibilitas ruang public yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan pasal 32 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat. Setiap trotoar wajib memiliki tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas tunanetra. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, menjelaskan tentang tanda-tanda aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tunanetra di trotoar.

Jalan Ir.H.Djuanda merupakan salah satu icon Kota Bandung yang dikenal juga dengan nama Jalan Dago. Jalan Ir.H.Djuanda memiliki panjang sekitar 2,5 kilometer. Dimulai dari arah Dago Pakar sampai ke perempatan Jalan

RE.Martadinata (Jalan Riau). Dalam penelitian ini membagi Jalan Ir. H.Djuanda kedalam dua bagian dari utara ke selatan. Pertama mulai dari Terminal Dago sampai dengan Pasar Simpang Dago. Kedua, mulai dari perempatan Jalan Ir.H.Djuanda-Jalan Dipati Ukur sampai dengan perempatan Jalan Ir.H.Djuanda-Jalan REE.Martadinata. pembagian ini dilakukan berdasarkan revitalisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung di tahun 2016. Revitalisasi ini difokuskan pada trotoar Jalan Ir.H.Djuanda mulai dari perempatan Jalan Ir.H.Djuanda-Jalan Dipati Ukur sampai dengan perempatan Jalan Ir.H.Djuanda-Jalan REE.Martadinata. Sedangkan trotoar Jalan Ir.H.Djuanda dari Terminal Dago sampai Pasar Simpang Dago tidak dilakukan revitalisasi, sehingga kondisinya memprihatinkan.

Kelengkapan Fasilitas Trotoar Jalan Ir.H.Djuanda Bandung

Keberadaan Ubin Pemandu di Trotoar Jalan Ir.H.Djuanda Bandung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menyediakan aksesibilitas pada penyandang disabilitas tunanetra pada trotoar-trotoar yang ada di Kota Bandung. Demikian pula pada trotoar yang ada di Jalan Ir. H. Djuanda Bandung yang telah mengalami revitalisasi. Sebagai bentuk peningkatan pelayanan dalam penyediaan aksesibilitas trotoar jalan bagi penyandang disabilitas ini, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan revitalisasi pada trotoar jalan sejak 2016. termasuk dengan trotoar yang ada di Jalan Ir. H.Djuanda. Revitalisasi Trotoar Jalan Ir. H.Djuanda selesai pada Bulan Februari 2017. Revitalisasi ini menyangkut perbaikan/pergantian ubin dan kelengkapan fasilitas trotoar.

Ubin pemandu yang terdapat di trotoar jalan mempunyai warna yang berbeda dengan ubin lainnya dan mempunyai dua jenis tekstur. Masing-masing tekstur mempunyai fungsi yang berbeda. Pertama, ubin dengan tekstur garis-garis, ubin ini mempunyai fungsi sebagai penunjuk arah perjalanan. Kedua, ubin dengan tekstur bulat-bulat, ubin ini mempunyai fungsi sebagai penanda peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya.

Berikut ini beberapa gambar yang menunjukkan keberadaan ubin pemandu dengan tekstur garis-garis pada trotoar Jalan Ir. H.Djuanda :

Gambar Kondisi Ubin Pemandu Tekstur Garis pada Trotoar Jalan Ir. H.Djuanda



Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat, bahwa ubin pemandu yang ada di trotoar Jalan Ir. H.Djuanda berada dalam kondisi yang sangat baik dan terpelihara. Ubin pemandu ini mempunyai warna yang berbeda dengan ubin lainnya. Warna ubin pemandu berwarna kuning, terlihat kontras dengan ubin lainnya yang berwarna abu-abu gelap. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yang menyatakan bahwa ubin pemandu pada trotoar harus berbeda warna nya dengan ubin lainnya. Pemeliharaan rutin dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk menjaga kebersihan trotoar tersebut. Pemeliharaan ini melibatkan pemerintah setempat, yaitu Kelurahan setempat.

Keberadaan petugas kebersihan ini mempunyai peranan yang besar dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan trotoar di Jalan Ir. H.Djuanda ini. Banyaknya pohon-pohon besar disekitar trotoar membuat banyaknya daun-daun yang berjatuhan. Dengan adanya petugas kebersihan tersebut, telah membuat kondisi trotoar tetap bersih dan nyaman.

Selanjutnya, mengenai keberadaan ubin pemandu dengan tekstur bulat-bulat di trotoar Jalan Ir. H.Djuanda. Ubin pemandu dengan tekstur bulat-bulat ini mempunyai fungsi sebagai penanda peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya. Keberadaan ubin pemandu dengan tekstur bulat-bulat terlihat di trotoar yang berujung pada jalan. Ini sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar Kondisi Ubin Pemandu pada Trotoar di Ujung Jalan



Sumber : Hasil Penelitian 2018.

Dari gambar diatas terlihat, bahwa keberadaan ubin pemandu dengan tekstur bulat-bulat pada trotoar Jalan Ir.H. Djuanda telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 30/PRT/M/2006. Penggunaan ubin pemandu dengan tekstur bulat-bulat ini menandakan adanya perubahan letak dan diujung trotoar ada jalan dan jalur penyebrangan jalan raya. Kondisi ubin pemandu tersebut terlihat jelas dan bersih. Meskipun di salah satu gambar terlihat adanya kondisi yang kurang rapi dan sedikit rusak. Namun secara keseluruhan kondisinya dapat dikatakan baik.

Selanjutnya, ubin pemandu dengan tekstur bulat-bulat juga ada di daerah yang pada trotoarnya terdapat rintangan berupa tiang atau taman, sehingga jalur ubin pemandu harus berbelok. Ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar Kondisi Ubin Pemandu pada Trotoar dengan Rintangan



Sumber : hasil penelitian 2018

Dari gambar diatas terlihat, penggunaan ubin pemandu dengan tekstur bulat-bulat telah digunakan sebagai penanda jalur yang berbelok karena adanya rintangan. Rintangan ini disebabkan adanya tiang listrik, bak kontrol dan taman. Kondisi ubin

terlihat baik sehingga penyandang disabilitas tunanetra tidak akan kesulitan berjalan di trotoar ini.

Fasilitas Penunjang di Trotoar Jalan Ir.H.Djuanda Bandung

Trotoar yang ada di Jalan Ir.H.Djuanda Bandung yang telah mengalami revitalisasi memiliki fasilitas yang lengkap. Revitalisasi ini telah dilakukan pada trotoar Jalan Ir.H.Djuanda yang berada mulai dari persimpangan jalan Ir. H. Djuanda – Jalan Dipati Ukur sampai dengan persimpangan Jalan REE.Martaditana. Sedangkan pada trotoar disepanjang jalan Ir. H.Djuanda mulai dari Terminal Dago sampai Pasar Simpang Dago tidak dilakukan revitalisasi sehingga kondisinya memprihatinkan. Fasilitas yang ada di trotoar tidak memadai. Bahkan terdapat di beberapa tempat sudah mengalami alih fungsi. Ada yang menjadi tempat usaha, tempat parkir, taman yang sampai menutupi seluruh trotoar.

Fasilitas yang tersedia pada trotoar jalan Ir. H.Djuanda yang telah mengalami revitalisasi terdiri dari fasilitas yang menunjang kenyamanan pengguna trotoar. Fasilitas tersebut yaitu kursi taman, kutipan/quotes, taman, papan informasi angkutan umum, tempat sampah. Fasilitas ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

Gambar Fasilitas Penunjang di Trotoar Jalan Ir. H.Djuanda Bandung



Sumber : Hasil penelitian, 2018.

Fasilitas-fasilitas tersebut berfungsi dengan baik dalam keadaan bersih dan terpelihara dengan baik. Fasilitas tersebut telah membuat trotoar Jalan Ir. H.Djuanda semakin nyaman, bagus dan indah.

Keberfungsian Fasilitas dan Kenyamanan Sarana/Prasarana Trotoar Jalan Ir.H.Djuanda Bandung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah melakukan pelayanan yang baik dalam menyediakan aksesibilitas trotoar jalan bagi penyandang disabilitas tunanetra di trotoar Jalan Ir. H.Djuanda. Ini terlihat dari fasilitas yang ada di trotoar jalan Ir. H.Djuanda berfungsi dengan baik. Lebar trotoar Jalan Ir. H.Djuanda sebesar kurang lebih 6 meter sangat kondusif.

Penggunaan trotoar telah dilakukan sebagaimana fungsinya. Pedagang kaki lima hampir tidak ditemukan di trotoar ini. Hal ini telah membuat kondisi trotoar Jalan Ir. H.Djuanda menjadi nyaman bagi pejalan kaki. Kondisi ini harus dipelihara oleh semua pihak. Kebersihan dari trotoar perlu dukungan dan keterlibatan dari seluruh masyarakat. Masyarakat pengguna trotoar harus ikut menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan aksesibilitas trotoar jalan bagi penyandang disabilitas tunanetra khususnya di trotoar Jalan Ir. H. Djuanda telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan fasilitas yang ada pada trotoar Jalan Ir. H. Djuanda telah sesuai dengan kebijakan tentang fasilitas dan aksesibilitas pada trotoar jalan. Kebijakan tersebut yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Rekomendasi

Dari kesimpulan diatas, peneliti menyarankan agar pemeliharaan fasilitas trotoar jalan menjadi tanggung jawab dari semua pihak, termasuk pengguna trotoar

jalan itu sendiri. Pihak-pihak yang dimaksud disini adalah pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas trotoar jalan, pemerintah akan kesulitan untuk melakukan pemeliharaan fasilitas ini. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan trotoar jalan harus selalu di pelihara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan Penelitian Internal Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Skema Pengembangan Ilmu dengan Kontrak Penelitian Nomor. 044AF/SP/LPPM/Unikom/V/2018.

DAFTAR RUJUKAN

- Berry dan Pasaruman. 2003. Jurnal “*Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan* “ vol.21 24-30 (Januari 2003).
- Hasibuan, S.P, Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan*. Jakarta:PT. Toko Gunung Agung.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pembangunannya*. Jakarta : Rajawali Press
- Ratminto dan Winarsih, Atik Septi. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karniawati, N., & Apriati, W. (2017). Aspek Transparansi dalam Kualitas Pelayanan pada Penyediaan Aksesibilitas Trotoar Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra di Kota Bandung. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 1(1).
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sinambela, Poltak. 2007. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Social : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wasistiono, Sadu. 2001. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Sumedang: Alqoprint.
- Zeithaml, A. Valarie, Parasuraman, Berry. (1990). *Delivering Quality Service*. New York: Free Press.
- Sever, Hak etc. 2000. *Service Management and Operations, Second Editions*. Prentice Hall International, Inc.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

SK Menpan No. 62/Kep.M.PAN/7/2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.

Detik,2015. melalui <http://news.detik.com/jawabarat/2766187/tunanetra-di-bandung-desak-ridwan-kamil-jalankan-perda-disabilitas>

jurnalasia,2016. Melalui <http://www.jurnalasia.com/bisnis/properti/revitalisasi-trotoar-di-bandung-selesai-akhir-2016/>

Rustanto,B.2013. Melalui <http://bambang-rustanto.blogspot.co.id/2013/08/konsep-disabilitas.html>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel>.